

## BAB II

### POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Sebelum melihat dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Libya, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami sejarah politik luar negeri Amerika Serikat.

#### A. SEJARAH POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Pada Sistem Partai Pertama, dua partai politik nasional berkembang mendukung atau menolak kebijakan Hamilton. Ketika Thomas Jefferson menjadi presiden, ia membeli Wilayah Louisiana dari Perancis, menggandakan luas wilayah Amerika. Perang kedua dan terakhir melawan Inggris berlangsung pada tahun 1812. Hasil utama dari perang tersebut adalah berakhirnya dukungan Eropa bagi serangan suku Indian terhadap para pemukim barat.



Di bawah dukungan demokrasi Jefferson dan demokrasi Jackson, Amerika Serikat meluas melalui pembelian Louisiana hingga sejauh California dan Oregon, serta pencarian lahan murah untuk para petani dan pemilik budak Yeoman yang mempromosikan demokrasi dan perluasan, yang harus dibayar dengan kekerasan dan kebencian terhadap kebudayaan Eropa. Perluasan ini, di bawah *Manifest Destiny*, adalah penolakan terhadap saran Partai Whig yang ingin meningkatkan dan memodernisasi ekonomi dan masyarakat alih-alih memperluas wilayah. Perbudakan dihapuskan di semua negara bagian di Utara (sebelah utara garis Mason-Dixon yang memisahkan *Pennsylvania* dan *Maryland*) pada tahun 1804, namun tetap berlangsung di negara-negara bagian di Selatan karena tingginya permintaan kapas dari Eropa.

Meskipun pada awalnya netral dalam Perang Dunia I, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1917, dan mendanai Sekutu hingga meraih kemenangan setahun kemudian. Setelah dekade kemakmuran pada tahun 1920-an, runtuhnya Wall Street 1929 menandai dimulainya Depresi Besar yang mendunia selama sedasawarsa. Franklin D. Roosevelt yang Demokrat menjadi presiden dan menerapkan program barunya, New Deal, untuk bantuan, pemulihan, dan reformasi, yang mendefinisikan liberalisme Amerika modern. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II bersama Sekutu dan membantu mengalahkan Jerman Nazi di Eropa dan mengalahkan Jepang di Timur Jauh.

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing dan memulai Perang Dingin. Kedua negara ini saling

bertikai secara tak langsung dalam persaingan senjata dan perlombaan angkasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin dipusatkan pada pembendungan Komunisme, dan negara ini ikut serta dalam perang di Korea dan Vietnam untuk mencapai tujuan ini. Liberalisme memperoleh banyak kemenangan pada masa *New Deal* dan juga pada pertengahan 1960-an, khususnya dalam kesuksesan gerakan hak sipil, namun *konservatisme* kembali berkembang pada tahun 1980-an dibawah Ronald Reagan. Perang Dingin berakhir setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa. Memasuki abad ke-21, konflik internasional berpusat di sekitar Timur Tengah dan meningkat tajam menyusul serangan 11 September serta Perang Melawan Terorisme yang dideklarasikan setelahnya. Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II pada akhir tahun 2000-an, yang disusul oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-an.<sup>1</sup>

## 1. Perang Dunia I

ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, awalnya Amerika Serikat mengambil kebijakan netral (*non-intervensi*), yaitu menghindari konflik tetapi mencoba menciptakan perdamaian. Keterlibatan Amerika terjadi ketika sebuah kapal-U Jerman menenggelamkan kapal pesiar Britania RMS Lusitania tanggal 7 Mei 1915 yang juga menewaskan 128 warga negara Amerika Serikat. Saat itu Presiden Woodrow Wilson menegaskan bahwa "Amerika Serikat terlalu bangga untuk

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat)

berperang", tetapi menuntut berakhirnya serangan terhadap kapal penumpang. Jerman patuh. Wilson gagal mencoba memediasi penyelesaian. Akan tetapi ia juga berkali-kali memperingatkan bahwa AS tidak akan menoleransi perang kapal selam tanpa batas karena melanggar hukum internasional.

Pada Januari 1917, Jerman melanjutkan perang kapal selam dan mulai menyadari Amerika Serikat akan ikut dalam perang. Menteri Luar Negeri Jerman Zimmerman mengirim telegram kepada Meksiko dan mengajak untuk bergabung sebagai sekutu Jerman melawan Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Jerman akan mendanai perang Meksiko dan membantu mereka mencaplok kembali teritori Texas, New Mexico, dan Arizona. Telegram itu bocor dan Wilson merilis telegram Zimmerman ke publik. Warga AS memandangnya sebagai casus belli—penyebab perang. Wilson meminta elemen-elemen antiperang untuk mengakhiri sementara kampanyenya. Ia berpendapat bahwa perang begitu penting sehingga AS harus punya suara dalam konferensi perdamaian.

Presiden Wilson di hadapan Kongres, mengumumkan keputusan hubungan resmi dengan Jerman pada tanggal 3 Februari 1917. Pengumuman perang terjadi saat Jerman menenggelamkan tujuh kapal dagang AS. oleh kapal selam dan penerbitan telegram Zimmerman, Wilson menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat secara formal tidak pernah menjadi anggota Sekutu, tetapi menjadi "Kekuatan Terkait". Amerika Serikat memiliki pasukan kecil, namun setelah pengesahan UU Dinas Selektif, pemerintah mewajibkan militer untuk 2,8 juta pria, dan pada musim panas 1918 Amerika Serikat mengirim 10.000 tentara baru ke Prancis setiap hari.

Pada 1917, Kongres A.S. memberikan kewarganegaraan AS kepada warga Puerto Rico saat mereka mendaftar untuk ikut serta dalam Perang Dunia I sebagai bagian dari UU Jones. Jerman telah salah perkiraan, percaya bahwa dibutuhkan beberapa bulan sebelum tentara Amerika Serikat datang membantu negara-negara Eropa.<sup>2</sup>

Sebagian besar warga Amerika bersimpati pada Inggris dan Perancis, meskipun juga banyak yang menentang intervensi AS. Pada tahun 1917, Amerika Serikat bergabung dengan Sekutu, dan Pasukan Ekspedisi Amerika turut membantu dalam melawan Blok Poros. Presiden Woodrow Wilson memainkan peran penting dalam Konferensi Perdamaian Paris 1919 yang membantu membangun kembali dunia pasca perang. Wilson menganjurkan agar AS bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Senat menolak menyetujui hal ini, dan AS tidak ikut meratifikasi Perjanjian Versailles, awal pembentukan Liga Bangsa-Bangsa.

Doktrin Monroe (1823) presiden James Monroe menggariskan kebijakan luar negeri Amerika berkaitan dengan isu tentang Amerika Latin yang ketika itu menjadi perebutan antara aliansi *Holy Alliance* (Rusia, Prusia dan Austria)-Prancis dan Inggris yang berusaha mempertahankannya sebagai sebuah koloni. Isi dari doktrin itu antara lain intinya, Amerika menolak segala intervensi pihak Eropa di Amerika. Namun demikian, Amerika akan berperang jika terlebih dahulu diserang dan tidak akan memulai suatu pertempuran. Dalam kaitannya dengan doktrin Monroe diatas, kebijakan presiden Woodrow Wilson pada awal Perang Dunia I dirasakan sesuai

---

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/05/02/mm5bw1-hari-ini-1917-amerika-serikat-menyatakan-perang-kepada-jerman>

dengan semangat perdamaian yang diterapkan Amerika sebelumnya. Wilson bahkan ketika itu tidak langsung menyerang Jerman ketika banyak rakyatnya mati pada insiden kapal Lusitania. Baru ketika Jerman semakin merajalela, Amerika mendeklarasikan perang. Presiden Wilson dalam suatu pidatonya berpendapat bahwa warga negara dan properti Amerika adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Amerika. Perusakan atasnya adalah “pertanda permusuhan”. Namun diupayakan suatu cara-cara damai pertama kali. Dalam kasus Jerman ini, memang bukan teritori yang diserang, akan tetapi Wilson menganggap bahwa penyerangan atas perdagangan, dalam hal ini kapal-kapal dagang Amerika adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia mengenai hak hidup. Maka hal itu merupakan alasan kuat bagi Amerika untuk ikut serta dalam perang.

Setelah memenangkan perang bersama sekutu, Wilson tidak lantas membuat klaim atas wilayah-wilayah Amerika. Bahkan dia berusaha mencegah pihak sekutu untuk melakukannya. Namun demikian sejumlah usahanya telah gagal termasuk meyakinkan negerinya sendiri atas piagam Liga Bangsa-Bangsa. Usaha-usaha Presiden Wilson untuk mengakhiri “perang dengan perang untuk demokrasi” telah membawa dilema bagi perdamaian dunia. Disatu sisi imperialisme Jerman bisa diatasi namun disisi lain kemenangan pihak sekutu telah membuat pihak tersebut merasa layak untuk berkuasa di dunia sehingga wajar bila perdamaian yang dicita-citakan Presiden Wilson menjadi kabur pada akhirnya meskipun ia telah berusaha keras. Mungkin kesalahannya karena ia “*melanggar*” doktrin Monroe tentang politik menarik diri dari konflik diluar Amerika. Namun ia pun harus membuat keputusan

ketika ada hal-hal yang mengganggu kepentingan Amerika dan keputusan peranglah yang akhirnya harus dipilih. Dengan demikian Doktrin Monroe tidaklah menjadi suatu ikatan yang sangat ketat lagi dalam kebijakan luar negeri

## **2. Perang Dunia II**

Perang Dunia II merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Pertama yang terjadi dan berakhir beberapa tahun setelahnya. Perang ini membawa pengaruh yang sangat luas, karena perang ini juga mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi antar-negara di Eropa yang juga berpengaruh luas pada hubungan internasional negara-negara di dunia di masa kini. Perang Dunia II dimulai tanggal 1 September 1939. Pernyataan lain menganggap bahwa perang ini terjadi lebih awal ketika Jepang berhasil menduduki wilayah Manchuria sekitar tahun 1937. Minggu tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan penyerbuan terhadap Pangkalan Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pearl Harbor merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Asia Pasifik. Dengan segera AS langsung menyatakan perang terhadap Jepang.

Selain Pearl Harbor, Jepang juga menyerang pangkalan udara AS di Filipina. Setelah serangan tersebut Jepang mulai menyerang koloni Inggris di Hongkong, Borneo, Malaya dan wilayah lainnya di sekitar Asia. Jepang juga menguasai daerah jajahan Belanda yang dikenal dengan Hindia-Belanda, yang termasuk di dalamnya Indonesia. Pendudukan Jepang di beberapa wilayah Asia Timur dan Tenggara

merupakan upaya untuk memperkuat pasukan dan kekuatan, dengan merekrut pasukan-pasukan dari daerah kekuasaannya.

Pada *Operasi Overlord* atau yang lebih dikenal dengan Invasi Normandia dilakukan oleh pasukan Sekutu pada tanggal 6 Juni 1944, sekitar 3 juta tentara menyeberangi Selat Inggris menuju Prancis guna melakukan serbuan terhadap tentara Nazi yang menduduki Prancis. Secara mayoritas, AS, Inggris, dan Kanada mengirimkan pasukan dalam operasi tersebut guna melakukan penyelamatan terhadap Prancis.

Sekitar tahun 1941 hingga 1944, Jepang berhasil menguasai wilayah yang meliputi wilayah-wilayah Asia tenggara dan wilayah Cina bagian Timur. Pada saat itu pasukan Amerika Serikat dan pasukan dari Eropa yang berhasil menyelamatkan diri membangun pertahanan di Australia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Enola Gay, bomber B-29 yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets, Jr. melepaskan satu bom atom yang dikenal dengan sebutan Little Boy di kota Hiroshima, yang dengan cepat menghancurkan kota tersebut. Dua hari kemudian tepatnya tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Mereka kemudian melancarkan serangan besar terhadap Manchuria yang diduduki Jepang, yang juga dikenal dengan istilah Operasi Badai Agustus.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat bomber jenis Boeing B-29 Superfortress "Bock's Car" yang dikemudikan oleh Mayor Charles Sweeney melepaskan satu bom atom yang dinamai Fat Man di kota Nagasaki. Bom tersebut mengakibatkan puluhan

hingga jutaan manusia tewas seketika, dan membumihanguskan kota itu dengan cepat. Pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, dan kemudian menandatangani surat pernyataan menyerah pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di teluk Tokyo.

Di Eropa, sekitar bulan Oktober 1942, pasukan gabungan AS-Sekutu yang dipimpin oleh Eisenhower (AS) dan Montgomery (Inggris) berhasil menaklukkan pasukan gabungan Jerman-Italia. Tahun 1944, pasukan AS-Sekutu berhasil menumbangkan kekuatan Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini. Akhirnya Italia menyerah kepada AS-Sekutu pada tanggal 1 Mei 1944.<sup>3</sup>

### **3. Perang dingin**

Perang Dingin berlangsung lebih dari 4 dekade dan dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II (1945) serta berlangsung hingga tahun 1991. Perebutan kekuasaan terjadi antara komunisme dan demokrasi (atau kapitalisme), dengan keduanya berusaha untuk mendominasi yang lain. Setelah Perang Dunia II berakhir, tidak ada negara Eropa yang cukup kuat sebagai pengimbang AS dan Uni Soviet. Meski demikian, selama Perang Dingin tak satu pun pihak yang berminat memulai konflik terbuka dan tetap berusaha menghindari terjadinya perang nuklir.

---

<sup>3</sup> <https://www.seniberpikir.com/sejarah-terjadinya-perang-dunia-ii/>

Kemunculan Amerika Serikat yang berperan sebagai pemenang perang pihak Sekutu, yakni Perancis dan Inggris. Keduanya memiliki peranan terbesar dalam membantu beberapa negara di Eropa Barat untuk memperbaiki kondisi perkonomiannya. Uni Soviet atau saat ini disebut dengan Rusia ini memiliki peranan dalam membebaskan Eropa Timur dari cengkraman Jerman serta membangun kembali perekonomian beberapa negara di Eropa Timur. Uni Soviet atau Rusia sempat menyebar luaskan pengaruhnya dengan cara mendukung terjadinya perebutan wilayah kekuasaan di negara-negara Eropa Timur, seperti Albania, Hongaria, Bulgaria, Polandia, Romania dan Cekoslovakia. Sehingga beberapa negara tersebut bisa masuk ke dalam pemerintahan komunis ala Uni Soviet. Kemunculan negara baru di luar Eropa yang telah berhasil merdeka pasca terjadinya Perang Dunia 2, menyebabkan adanya 2 aliansi negara di dunia, yakni negara maju dan negara berkembang yang memberikan pengaruh bagi perkembangan ekonomi dan politik dunia. Konflik ketegangan Perang Dingin pada hakikatnya dipicu dengan adanya perlombaan senjata antara kedua belah pihak, Amerika dan Rusia. Kedua negara adikuasa tersebut saling berlomba dalam mempercanggih berbagai alutsista persenjataan mereka dari yang mematikan sampai paling mutakhir.

Pasca-Perang Dingin, AS yang dikenal sebagai negara adidaya. Hal tersebut dapat dilihat AS sebagai pelopor dan pendukung utama munculnya World Bank, International Monetary Fund, dan World Trade Organization. Kondisi dunia yang semakin mengglobal, dimana batas-batas antar negara menjadi semakin kabur atau

lebih dikenal dengan istilah 'globalisasi'. Secara tidak langsung menerangkan dominasi AS di dunia Dominasi AS dalam organisasi-organisasi ekonomi internasional tersebut merupakan representasi dari kepentingan domestik AS. Berkedok dari kebijakan-kebijakan yang menawarkan bantuan bagi negara-negara Dunia Ketiga, melalui bantuan-bantuan keuangan yang “bersyarat”. Ternyata hanya akan memberikan kerugian bagi negara di dunia ketiga dalam jangka panjang. Yaitu misalnya dengan menetapkan nilai suku bunga yang tinggi. *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization* merupakan alat bagi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya., tidak hanya dalam segi ekonomi, bahkan juga dalam segi politik dan ideologinya. Sehingga, jika dilihat dari kacamata ini, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah tidak lagi menjadi *central state actor* dalam pengatur dan pengontrol interaksi dalam perdagangan antar negara.

Kemunculan *non-state actor* justru dilihat sebagai pemain baru yang memainkan peran central-actor, dengan demikian hanya negara-negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta power yang kuatlah yang memiliki peran dan mampu bersaing dalam perekonomian dan perdagangan internasional. Melalui kekuasaannya, AS yang memiliki modal yang sangat besar yang berasal dari perusahaan-perusahaan seperti MNCs, TNCs, dsb. AS mampu menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam

pengambilan kebijakan dalam tiga organisasi ekonomi internasional terbesar di dunia. Amerika Serikat mengingat semakin bertambahnya kepentingan negara.<sup>4</sup>

## **B. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

Proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat berbeda dengan pembuatan kebijakan dalam negeri atau domestic, didalam proses pembuatannya lebih memperhatikan beberapa kunci yaitu dimana otoritas presiden lebih besar, pengaruh kongres lebih terbatas dan lebih mengesampingkan masukan dari kelompok kepentingan domestik. Presiden memiliki otoritas lebih tinggi karena presiden memiliki lebih banyak dari berbagai pihak seperti CIA, NSC serta departemen luar negeri, sehingga informasi serta kondisi eksternal dari amerika Serikat menjadi kunci bahwa dalam pengambilan kebijakan luar negeri otoritas presiden lebih tinggi dari kongres. Selain itu konstitusi juga memiliki pengaruh penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, hal ini disebabkan karena didalam konstitusi mengatur bahwa tujuan utama dari kebijakan luar negeri AS adalah untuk mencapai tujuan nasionalnya atau national interest yaitu untuk membangun dan mempertahankan sebuah dunia yang lebih demokratis. Aman dan sejahtera untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat serta masyarakat international.<sup>5</sup> Dan

---

<sup>4</sup> <http://www.amazine.com/39000/16-fakta-informasi-menarik-tentang-perang-dingin/>

<sup>5</sup> Storey wil, (2007) US Government and Politics Politik Study Guides, (Edinburgh) Edinburgh University Press. Hal. 313.

mengatur tentang wewenang dari legislatif atau kongres yang dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat, pembagian kewenangan kongres dan presiden dalam negeri juga akan saya jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

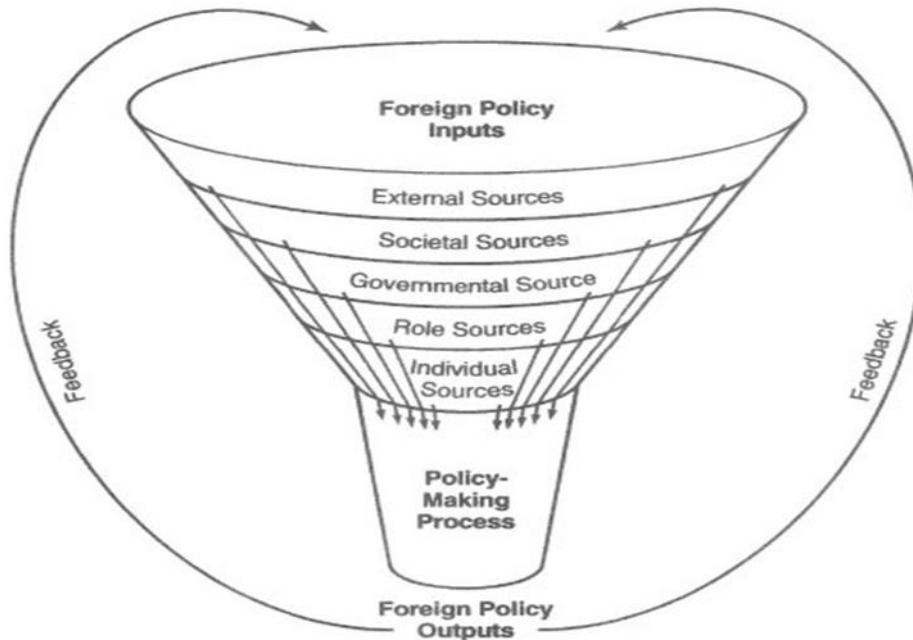
Tabel: 1

**Pembagian Wewenang Dalam Kebijakan Luar Negeri**

Wewenang Presiden	Wewenang kongres
<i>Presiden sebagai komando tinggi pasukan bersenjata</i>	<i>Kongres memiliki wewenang untuk mendeklarasikan perang</i>
Presiden dapat menegosiasikan perjanjian	Kongres dapat meretifikasi atau menolak perjanjian
Presiden dapat mencalonkan duta besar dan kunci-kunci penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri seperti pemimpin departemen luar negeri, departemen pertahanan dan CAI	Kongres mempunyai wewenang untuk menyetujui atau menolak pencalonan duta besar dan kepala-kepala dari instansi dibawah lembaga eksekutif
Presiden dapat menerima representasi dari pemerintahan lain	Kongres dapat meningkatkan dan mendukung angkatan bersenjata serta kapabilitas melalui peningkatan belanja militer

Didalam proses pembuatan kebijakan luar negeri AS melibatkan berbagai sumber yang saling terkait antara satu sama lain dan hal ini yang menyebabkan pembuatan kebijakan politik luar negeri lebih bersifat kompleks Seperti didalam kerangka analisis seperti yang dibuat oleh Eugene yang dibagi menjadi *eksternal source, social source, governmental source, role source, individual source*.<sup>6</sup>

Gambar 1.0



a. *External Source*

---

<sup>6</sup> Eugene R. Wittkopf; Christopher M. Jones; Charles W. Kegley, Jr. (2013) Amerika Foreign Policy Pattern and Proses. Belmont; Thomson Wadsworth. Hal. 132

Sumber external diartikan sebagai pengaruh dari akto-aktor non negara dalam system internasional yang memiliki peran sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Actor non Negara ini dapat berupa I-NGO (international non government organization) sumber external juga dapat berupa permasalahan yang terjadi di dunia internasional atau juga tindakan dari aktor-aktor international yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat.

***b. Sosial Source***

Social source diartikan sebagai dua variable yaitu opini public dan politik dalam negeri yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan itu sendiri, hal ini menjadi penting karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negeri

***c. Government source***

Government source diartikan sebagai sumber-sumber dari pemerintahan merupakan aspek-aspek dari struktur pemerintahan yang membatasi atau menambah pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS. Sebagai contoh CIA dan departemen luar negeri memiliki informasi penting terkait pembuatan kebijakan luar negeri.

***d. Role source***

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri terdapat peran-peran penting, karena pembuatan keputusan dipengaruhi oleh tingka laku social dan norma-norma yang berlakudalm peran yang dipegang oleh seseorang. Posisi pembuatan keputusan dapat memberikan pengaruh terhadap masukan bagi kebijakan luar negeri AS,

*e. Individual source*

Karakteristik seseorang pembuat kebijakan dapat menentukan arah dari kebijakan luar negeri AS, hal ini dikarenakan didalam proses pembuatan kebijakan sifat dari presiden dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.<sup>7</sup>

### **C. DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN LIBYA**

Pada tahun 1911, Italia menduduki Libya dengan kekuatan ekspedisi 100.000 orang. Tak lama setelah invasi, tentara Italia menembak dan menggantung 5.000 orang Libia dan mendeportasi ribuan lainnya. Pada tahun 1930, atas perintah Mussolini, setengah dari *populasi Cyrenaica*, sekitar 100.000 orang, dideportasi ke sekitar lima belas kamp konsentrasi, sementara penerbangan menghancurkan perlawanan dengan membombardir desa-desa dengan senjata kimia, dan tentara mengepung daerah tersebut dengan 270 Kilometer dari kawat berduri.

Kepala perlawanan, Omar al-Mukhtar, ditangkap dan digantung pada tahun 1931. Maka mulailah kolonisasi demografis Libya, dengan memisahkan tanah yang paling subur dan memaksa penduduk memasuki lahan gersang. Pada awal tahun 1940an, Italia, yang sekarang dipukuli, digantikan di Libya oleh Inggris Raya dan Amerika Serikat. Emir Idris al-Senussi, yang ditempatkan di atas takhta oleh Inggris pada tahun 1951,

---

<sup>7</sup> Ibid

mengakui kekuatan ini sebagai penggunaan basis udara, angkatan laut dan darat Libya. *Wheelus Field*, di gerbang Tripoli, menjadi basis udara dan nuklir utama Amerika Serikat di Laut Tengah.

Pada tahun 1951, Libya di pimpin oleh Raja Idris melalui persetujuan yang dilakukan Inggris dan Amerika. Hubungan antara Amerika Serikat dan Libya pada saat itu terjalin cukup baik. Namun, pada akhir era 50an ditemukan ladang minyak di Libya oleh perusahaan minyak Amerika dan Italia yaitu, Esso dan Eni. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat dan Italia mendapat bagian untuk eksplorasi minyak di Libya yang berujung pada kerusuhan dan pemberontakan golongan nasionalis.

Pada tahun 1956, King Idris menyimpulkan sebuah kesepakatan yang membebaskan Italia dari kerusakan yang dilakukan ke Libya, dan membiarkan masyarakat Italia mempertahankan warisannya. Ladang minyak Libya, yang ditemukan pada tahun 1950an, berakhir ditangan perusahaan Inggris British Petroleum, perusahaan AS Esso, dan perusahaan Italia Eni. Pemberontakan nasionalis yang ditindas secara brutal tersebut menyebabkan kudeta tak berdarah Nasserian pada tahun 1969, oleh “perwira gratis” yang disutradarai oleh Muammar el-Kadhafi.

Pada tahun 1969, Kolonel Khaddafi berhasil mengkudeta Raja Idris dan menobatkan diri sebagai pemimpin Libya. Kebijakan Khaddafi yang melakukan nasionalisasi asset milik asing termasuk milik Amerika dan Italia yang sedang memiliki kepentingan eksplorasi minyak di Libya atas pemberian Raja Idris serta mengevakuasi pangkalan

militer Inggris dan Amerika dari Libya. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan Libya menjadi tidak harmonis.

Monarki dihapuskan, dan Jamahiriya Arab Libya mewajibkan AS dan Inggris untuk mengevakuasi pangkalan militer dan menasionalisasi properti asing tersebut. Dalam dekade berikutnya, menurut Bank Dunia, Libya tumbuh menjadi bagian dari “*indikator perkembangan manusia yang tinggi*”, dengan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 7,5%, dan upah per warga yang berada di kelompok rata-rata atas braket Libya warga negara menikmati akses universal terhadap pendidikan dasar dan menengah, dan 46% memiliki akses ke pendidikan tinggi. Lebih dari 2 juta imigran Afrika berhasil bekerja di sana. Negara bagian ini, yang merupakan faktor stabilitas dan perkembangan di Afrika Utara, telah, dengan investasinya, menyukai kelahiran organisme yang dapat menciptakan otonomi keuangan dan mata uang independen untuk Uni Afrika.

Pada tahun 1980 terjadi bentrokan militer antara Amerika Serikat dan Libya, dimana Libya menyerang kepangkalan laut Amerika Serikat yang dibalas dengan penghancuran instalasi militer Libya dikawasan pesisir. Presiden Amerika Serikat ketika itu Ronald Reagan mendukung kegiatan clandestainterdhadap Libya, seperti propaganda, sabotase dan penyebaran berita bohong dan dukungan kelompok oposisi.

Amerika Serikat dan Prancis seperti yang Hillary Clinton email membuktikan - memutuskan untuk memblokir “rencana Kadhafi untuk menciptakan mata uang Afrika” sebagai alternatif dari dolar dan CFA. Untuk alasan itu, dan agar sesuai dengan minyak

dan wilayah Libya, NATO, di bawah komando AS, meluncurkan kampanye melawan Kadhafi, di mana "oposisi sayap kiri" Italia memainkan peran utama. Oleh karena itu, negara Libya dihancurkan oleh perang dan oleh serangan dari pedalaman oleh pasukan khusus dan kelompok teroris. Bencana sosial yang dihasilkan, yang telah menciptakan lebih banyak korban daripada perang itu sendiri, terutama di kalangan imigran, membuka pintu bagi penaklukan dan pembagian kembali Libya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.voltairenet.org/article190681.html>

